

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah merupakan pihak yang dipercaya oleh rakyat guna mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan untuk memenuhi hajat hidup masing – masing individu. Sebagai organisasi yang berorientasi *non-profit*, pemerintah daerah mempunyai tujuan utama adalah untuk memberikan pelayanan yang *Optimal* kepada masyarakat, antara lain : pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur. Oleh sebab itu tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka harus ada sebuah bentuk pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.

Masing – masing pemerintah daerah baik itu yang berada di tingkat provinsi, kabupaten atau kota mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara berkala. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis laporan keuangan merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk melihat dan menilai kinerja setiap daerah dalam pengelolaan keuangannya. menurut “undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka setiap pengelola keuangan daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya meliputi, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.”

Dalam “undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Laporan Keuangan yang dimaksud harus disusun melalui proses akuntansi, yang wajib dipatuhi oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta bendahara umum daerah. Penyajian laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai oleh masing – masing pemerintah daerah”.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan memiliki peran untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan kegiatan transaksi selama periode tertentu”. Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai dasar pengambilan keputusan, hal ini mengharuskan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara sederhana agar mudah dipahami oleh pihak – pihak yang berkepentingan terhadap laporan tersebut. Meski sudah dibuat secara sederhana namun tidak semua pemangku kepentingan dapat memahami & menginterpretasikan laporan tersebut, oleh sebab itu maka perlu dibantu dengan membuat analisis laporan keuangan.

“Dampak dari diterapkannya standar dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah menjadi luas dan memiliki ketepatan waktu lebih baik. Hal ini berpengaruh pada tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah daerah. Karena saat ini masyarakat lebih mengerti bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah menjadi konsumsi semua lapisan masyarakat sebagai alat untuk mengkritisi dan menilai kinerja pemerintah daerah.

Dalam pengukuran kinerja pemerintah diperlukan beberapa indikator yang dapat dinyatakan dengan jelas” (Mardiasno, 2007). “Kinerja pemerintah biasanya dinyatakan dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan konsep pengukuran kinerja *value for money*, Ekonomis adalah konsep yang berkaitan antara jumlah *input* dengan nilai *input*, sementara efisien merupakan perbandingan antara jumlah *input* dengan *output* dan efektifitas berkaitan dengan *output* dan *outcome*”. Menurut (Mahmudi, 2007) kinerja keuangan tersebut dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Penggunaan rasio keuangan pada organisasi sektor publik khususnya pemerintah daerah belum banyak dilakukan jika dibandingkan dengan sektor privat hal ini disebabkan, antara lain :

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada pemerintah daerah dimana sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan organisasi sektor privat.
2. Penilaian keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih di tekan kan pada target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD.

Menurut (Saputra et al. 2018), “penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten jembran tahun anggaran 2010 – 2014”. Menyimpulkan bahwa dilihat dari analisis varians, pendapatan termasuk dalam kategori baik., dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, dilihat dari rasio

kemandirian keuangan daerah termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini menandakan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif daerah pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya.

Menurut (Rosida et al. 2011) “pada penelitian yang berjudul analisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo”. menyimpulkan bahwa hasil perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah kota palopo, kinerja keuangan pemerintah kota palopo dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan belum efektif karena rasio efektifitasnya belum mencapai 100%.

Menurut (Zakarian dan Ashrori, 2019) “dalam penelitiannya yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan”. diperoleh kesimpulan bahwa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah tergolong efisien, karena dengan biaya yang relatif sedikit pemerintah kabupaten lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi jawa timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di wilayah

Propinsi Jawa Timur agar dapat mengukur, menilai, dan membandingkan kinerja keuangan masing-masing daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu pada tahun 2016 – 2020 dengan menggunakan Analisis Aset, Analisis arus kas, Analisis realisasi pendapatan dan belanja, Analisis kewajiban dan Ekuitas, dan analisis pertumbuhan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguji kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan Analisis Relaisasi Pendapatan dan belanja, Analisis Aset, Analisis Arus Kas, Analisis Pertumbuhan, Analisis Kewajiban dan Ekuitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk Pemerintah Daerah adalah sebagai bahan koreksi, evaluasi dan untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil selanjutnya sehingga menjadi lebih efektif dan tepat sasaran untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
2. Untuk Anggota Legislatif adalah diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan terkait dengan pengelolaan keuangan
3. Untuk peneliti merupakan sarana untuk menambah wawasan tentang bagaimana bentuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik.

